

KEMERDEKAAN NASIONAL DAN SALING KETERGANTUNGAN EKONOMI BANGSA-  
BANGSA

Daoed JOESOEF

Apabila kemerdekaan nasional sudah dicapai, selalu ada kehendak untuk mengisinya melalui usaha-usaha yang positif di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi lebih penting setelah ada pemikiran yang mengatakan bahwa kedaulatan bangsa yang berkaitan erat dengan kemerdekaan nasional itu hanya dapat diwujudkan secara penuh bila bangsa yang bersangkutan "kuat" di bidang ekonomi. Maka itu selalu ada kecenderungan untuk timbulnya slogan tidak hanya kemerdekaan (politik) nasional tetapi juga kemerdekaan ekonomi. Namun apakah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan ekonomi? Di dalam perkembangan ekonomi dunia yang sudah begitu kait-berkait secara kompleks, kiranya tidak dapat dikatakan lagi adanya kemerdekaan ekonomi yang absolut. Maka bila kemerdekaan ekonomi itu hanya ditanggapi secara relatif, maka soal yang lebih relevant untuk dipikirkan adalah bukannya kemerdekaan ekonomi, walaupun secara relatif, tetapi persoalan saling ketergantungan (interdependensi) ekonomi. Dan bila soal saling ketergantungan ekonomi ini dikaitkan dengan soal isi "kemakmuran" dari kemerdekaan nasional, maka perlu dibahas faktor-faktor apa yang membuat saling ketergantungan ekonomi itu tidak memberikan hasil yang sepadan bagi setiap bangsa.

Analisa berikut ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama membahas persoalan saling ketergantungan ekonomi itu sendiri dan yang kedua membahas tindakan-tindakan apa yang kiranya perlu diambil untuk membangun struktur yang sepadan guna dapat bermain dengan menguntungkan dalam saling ketergantungan tersebut.



## I. Saling ketergantungan ekonomi

Ilmu ekonomi pada mulanya menganggap kemerdekaan nasional bukan merupakan obyek pemikiran ekonomi. Baginya para pelaku ekonomi maupun kesatuan-kesatuan ekonomi bukanlah bangsa, tetapi perusahaan, baik yang dilakukan oleh dan atas tanggung jawab pribadi maupun secara dan atas tanggung jawab sekumpulan pribadi-pribadi. Karenanya perdagangan, baik dalam negeri (nasional) maupun luar negeri (internasional), pada azasnya adalah perdagangan antara perusahaan-perusahaan. Demi kelancaran perdagangan itu perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberikan kebebasan bertindak dan bergerak.

Sebagai akibat pembaharuan yang dibawa oleh Keynes, pemikiran ekonomi mulai mengakui bahwa perdagangan (pertukaran) internasional berkembang antara ekonomi-ekonomi nasional yang mencapai atau bergerak di sekitar titik "full employment". Tetapi titik ini tidak tercapai secara spontan, melainkan melalui serangkaian kebijaksanaan pemerintah yang dengan sengaja dan sadar ditujukan ke arah penyedotan para pekerja yang masih menganggur. Jadi diakui tidak hanya perlunya campur tangan "pemerintah nasional", tetapi juga bahwa "kemerdekaan nasional" merupakan syarat yang diperlukan bagi pencapaian titik optimum ekonomi, baik nasional maupun internasional, sebab tanpa kemerdekaan itu tidak akan mungkin sesuatu penguasa mengambil kebijaksanaan yang dianggapnya dapat mengabdikan kepentingan para pelaku ekonomi yang diperintahnya. Walaupun sudah semaju demikian, pemikiran ekonomi keynesian ini masih mengandung kekurangan, yaitu menganggap bahwa hubungan ekonomi adalah semata-mata hubungan pertukaran barang dan jasa.

Secara fundamental hubungan ekonomi selalu merupakan campuran antara pertukaran barang dan perbandingan kekuatan. Perbedaan dan ketidak-sepadanan dalam kekuatan para pelaku ekonomi yang mengadakan hubungan tetap merupakan faktor yang ikut menentukan dan ini lebih-lebih berlaku sejauh hubungan tersebut terletak di bidang perdagangan (pertukaran) internasional. Baik harga maupun kuantum yang disepakati di bidang ini selalu ditandai oleh faktor tersebut, demikian pula arus dan keseimbangan barang dan jasa yang terbentuk di situ. Dari cara melihat seperti ini kiranya dapat disimpulkan beberapa tanggapan-ekonomi mengenai "bangsa".



Suatu bangsa dalam dirinya merupakan satu kombinasi kegiatan dan aktivitas ekonomi (industri) para warganya. Isi, dimensi, dan pengelompokan kegiatan tersebut ke dalam berbagai sektor (pertanian, pertambangan, perindustrian, administrasi, dan lain-lain) menentukan struktur neraca pembayarannya terhadap luar negeri, kesanggupannya mempengaruhi bangsa lain dan kemampuannya menerima ataupun menolak pengaruh dari luar.

Suatu bangsa, dipandang dari sudut lokalisasi aktivitas ekonomi para warganya, merupakan gabungan dari daerah maju dan terbelakang, kombinasi jaringan transport dan zone penggerak pembangunan. Sifat, letak dan bobot elemen-elemen itu di dalam keseluruhannya menentukan apakah aktivitas bangsa ini akan sampai melampaui batas kebangsaannya atau menerima aktivitas lanjutan dari bangsa lain.

Suatu bangsa adalah kombinasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dan finansial. Kombinasi ini merupakan dasar kemampuannya untuk mempengaruhi partnernya di bidang internasional dan atau menghadapi pengaruh yang hendak didesakkan oleh pihak lain kepadanya. Kemampuan ini diterapkan baik melalui pasaran modal, uang ataupun mythe uang nasionalnya.

Di pihak lain, di bidang pertukaran barang dan jasa antar-bangsa, perkembangan teknologi telah merubah "ekonomi internasional" menjadi ekonomi-dunia melalui perubahan yang ditimbulkannya dari ekonomi "faktor produksi" menjadi ekonomi "pengetahuan". Bangsa yang tidak turut ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi-dunia tersebut berarti menulis resep bagi dekadensi ekonomi nasionalnya sendiri. Turut berkecimpung dalam ekonomi dunia berarti tidak mengasingkan dan menutup diri secara autarkis tetapi pula berarti secara sadar mengkaitkan perkembangan ekonominya pada perkembangan ekonomi bangsa lain. Ternyata sangkut-paut ekonomi bangsa-bangsa itu sudah begitu rupa sehingga dapat dikatakan bahwa kini praktis tidak ada satu bangsapun yang benar-benar berdiri sendiri, sesedikitnya tidak di semua bidang ekonomi.

Bagi pelaku ekonomi individuil, besar-kecilnya hasil yang dapat ditariknya dari partisipasinya di bidang lalu-lintas pertukaran internasional, tergantung sekali dari keseluruhan struktur di mana dia tergolong; dengan perkataan lain, tergantung pada "bangsa" mana dia termasuk. Sebaliknya, struktur yang berbeda-beda dari bangsa tidak hanya menentukan perbedaan hasil pelaku ekonomi individuil, tetapi juga menentukan akibat dan



pengaruh yang diterima bangsa itu sendiri dari partisipasinya dalam ekonomi dunia. Dengan perkataan lain, ekonomi dunia memberikan pengaruh yang asimetrik terhadap bangsa-bangsa sesuai dengan "struktur" yang membentuk tubuh bangsa itu sendiri. Maka itu bagi sesuatu bangsa yang ingin turut berpartisipasi di dalam ekonomi dunia, dan memang hampir tidak mungkin untuk tidak turut, sebaiknya lebih dulu meneliti dengan sempurna struktur yang membentuk dirinya. Apakah struktur yang dipunyai-nya merupakan modalitas yang kuat (ampuh) atau lemah untuk terjun di dalam ekonomi dunia.

Berdasarkan observasi dapat diajukan di sini beberapa kelemahan struktural untuk dapat masuk begitu saja ke dalam ekonomi dunia.

Pertama, koefisien perdagangan luar negeri yang tinggi sedangkan pada waktu yang bersamaan struktur produksi dan ekspor yang sangat terpusat pada sejumlah kecil komoditi. Sebaliknya jumlah kecil ekspor ini sudah merupakan bagian yang besar dari produk domestik sedangkan jumlah pasaran komoditinya terbatas. Bangsa yang berstruktur lemah seperti ini sulit, dalam waktu yang relatif singkat, untuk membuat diversifikasi dalam produksi dalam negerinya, demikian pula untuk membuka lebih banyak pasar terbuka untuk eksportnya.

Kedua, bangsa ini tidak mempunyai suatu industri organik. Dengan ini dimaksudkan serangkaian aparat industriil yang lengkap dan secara tepat berkaitan dengan aktivitas ekonomi di bidang lainnya, pertanian, perdagangan dan transport. Artinya, bangsa yang begini hanya mempunyai tata industri yang sporadik, tidak lengkap dan kurang sempurna kaitannya dengan lain-lain aktivitas ekonomi dalam negeri.

Ketiga, bangsa ini mempunyai kemampuan yang rendah untuk menghasilkan pekerja-otak (knowledge workers), teknisi dan lain-lain pekerja ahli. Maka itu sangat membatasi potensi perkembangan industriil yang memang sudah lemah bila dipandang dari sudut permodalan.

Keempat, impor bahan baku/penolong merupakan bagian yang besar dari keseluruhan impor dan karenanya gejolak harga di luar negeri, melalui harga bahan baku/penolong tersebut, akan tersebar ke seluruh sektor produktif dalam negeri.

Kelima, bangsa ini dengan struktur yang dipunyai-nya itu sangat mudah menerima akibat ketidak-seimbangan yang ditimbulkan oleh aparat moneter dan finansial bangsa lainnya.



Bila kita kini mengalihkan pandang ke arah struktur yang membentuk ekonomi nasional kita, akan segera terlihat betapa terpenuhinya ukuran-ukuran kelemahan struktural tersebut di atas. Koefisien perdagangan luar negeri kita memang cukup tinggi, yaitu sebesar kira-kira 30% sedangkan lebih dari separuh hasil ekspor berasal dari hanya empat komoditi. Bagian dari impor bahan baku/penolong dalam keseluruhan impor pada tahun 1970/1971 sampai dengan 1972/1973 adalah sebesar 35,4, 41,3 dan 39,7 persen. Berhubung kemampuan finansial dan peralatan yang terbatas maka kemampuan memproduksi tenaga ahli juga sangat terbatas, sehingga "response" tidak selalu sesuai dengan "challenge" yang timbul.

Maka dipandang dari sudut ini bangsa kita mempunyai ketidak-sepadanan di dalam struktur ekonomi, ketidak-sepadanan bila dibanding dengan semua faktor yang strategis di bidang-bidang yang menentukan dapat-tidaknya kita menarik hasil yang sepadan dari partisipasi kita di dalam ekonomi dunia. Jadi soal yang kita hadapi, seperti juga yang dihadapi oleh banyak bangsa lainnya, bukanlah ada-tidaknya "kemerdekaan ekonomi", tetapi mempunyai atau tidak mempunyai struktur ekonomi yang sepadan untuk menghadapi akibat atau pengaruh yang asimetris dari perputaran ekonomi dunia.

## II. Usaha-usaha perbaikan struktur

Langkah-langkah yang kiranya perlu diambil dalam rangka pembinaan struktur yang sepadan guna dapat menarik hasil yang sepadan dari partisipasi bangsa kita dalam ekonomi dunia adalah seperti berikut:

Pada taraf makro-nasional persiapan berupa penciptaan dari apa yang oleh Dr. J. PANGLAYKIM disebut sebagai "Indonesian Incorporation", yaitu pola kerjasama yang erat antara pemerintah, birokrat, teknokrat dan bisnis sehingga kita secara nasional dapat membangun satu kesatuan kekuatan yang dalam dirinya berupa satu "kekuatan-tandingan" (countervailing power) berhadapan dengan IINC sebagai partner. Usaha pembentukan kekuatan-tandingan ini juga sekaligus dilakukan pada tingkat mikro-ekonomi. Hal ini merupakan keharusan mengingat struktur bisnis yang ada di negeri kita dewasa ini bersifat atomistik, dalam artian struktur di mana terdapat ribuan



perusahaan kecil ataupun menengah yang kurang diorganisir secara baik dan di mana hubungan satu dengan lainnya, walaupun hubungan itu ada, lebih bersifat personil daripada zakelompok. Walaupun perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ini mempunyai fungsi dan peranan dalam proses pertumbuhan bisnis nasional, namun harus diakui bahwa ia sebagai keseluruhan tidak dapat dijagakan sebagai kekuatan-tandingan terhadap perusahaan-perusahaan raksasa asing. Maka itu partisipasi nasional sebagai cara untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari penanaman modal asing harus dilakukan melalui "national integrated units" di bidang industri, perusahaan, perdagangan dan keuangan. Selain berfungsi sebagai kekuatan-tandingan terhadap perusahaan raksasa asing, national integrated units tersebut, sebagai kesatuan-kesatuan bisnis besar, dibutuhkan pula untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, terutama di bidang supply bahan baku dan pemasaran barang-jadi yang dihasilkan.

Usaha-usaha besar yang inherent dengan national integrated units tersebut sudah tentu memerlukan pembiayaan yang besar. Satu, dua atau tiga bank-bank pembangunan yang difungsikan untuk melayani ratusan bahkan ribuan aktivitas investasi tidaklah cukup dan karenanya tidak akan dapat menanggulangi perkembangan kebutuhan finansial yang relatif besar itu. Sedangkan kebutuhan finansial yang relatif rendah seperti yang terdapat dewasa ini saja sudah sukar untuk memuaskannya. Sehingga tidak mengherankan bila kebutuhan tersebut untuk sebagian terbesar dibiayai oleh perusahaan raksasa asing, yang berarti melalui "company finance", dengan konsekwensi-konsekwensi yang terang tidak menguntungkan bagi usaha pembangkitan kekuatan bisnis dan ekonomi nasional. Dengan cara begini pihak nasional yang berpartner dengan bisnis raksasa asing hanya menjadi "verlengstuk" belaka dari usaha-usaha raksasa asing, direduksi sebagai "perantara", satu kedudukan yang persis sama seperti yang berlaku dalam periode kolonial Belanda dahulu. Maka itu di samping menciptakan national integrated units, sebaiknya diciptakan pula fasilitas-fasilitas pembiayaan dalam bentuk "national financial consortium". Consortium seperti ini dapat bersifat swasta ataupun berupa kerjasama swasta dengan bank-bank pemerintah, dengan partisipasi aktif dari bank-bank devisa swasta, tetapi menarik dan mempunyai affiliiasi yang erat dengan financial consortia yang berstatus internasional, satu dan lain guna menarik dana-dana yang beredar di pasaran uang dan modal internasional.



Inilah kiranya salah satu cara kita menggunakan secara maksimum creditworthiness dunia perbankan nasional yang sebenarnya sudah ada sebagai keseluruhan di kalangan finansial internasional.

Di bidang mikro-nasional, untuk mengoreksi ketidak-sepadanan di bidang struktur industriil perlu dibina kerjasama yang lebih erat antara dunia pengetahuan, dunia riset termasuk laboratorium dan pemerintahan, khususnya di dalam pembangunan industri-industri spesialis seperti kimia, optik, dan lain-lain.

Sejauh yang mengenai kriteria investasi sebaiknya tidak hanya dibatasi pada kriteria ekonomis, seperti kenaikan GNP, kesempatan kerja, atau kriteria lainnya yang sejenis dengan itu, tetapi turut diperhitungkan pula persoalan "kebebasan" ataupun "transformasi strategis". Dengan ini dimaksudkan kemampuan merubah tenaga dan faktor non militer untuk menjadi tenaga dan faktor yang efektif di bidang militer bila saatnya diperlukan. Misalnya, bila secara teknis memang benar bahwa pabrik pupuk relatif mudah ditransformir menjadi pabrik senjata ringan, maka pabrik pupuk perlu didirikan. Sebab pabrik seperti ini tidak hanya diperlukan hasilnya untuk sektor pertanian di masa damai, tetapi juga diperlukan peralatannya di masa perang. Dengan mengambil keputusan yang seperti ini, kita artinya mempergunakan "kemerdekaan" kita untuk mengambil keputusan-keputusan di bidang ekonomi yang akibatnya secara potensiil juga mempunyai arti kelak untuk mempertahankan "kemerdekaan" itu secara fisik.

Sejauh mengenai proses pembinaan tenaga teknisi ahli memang harus diakui memerlukan biaya yang besar. Tetapi kiranya biaya ini dapat diusahakan melalui kehadiran bisnis asing yang beroperasi di negeri kita. Dengan begini artinya usaha nasional guna menarik manfaat yang maksimum dari aktivitas bisnis asing tidak boleh hanya dibatasi pada bidang ekonomi melainkan diperluas ke bidang sosial, berupa peningkatan pemberian training kepada calon tenaga-kerja, terutama drops out, ke arah penguasaan ketrampilan teknik elementer dan industrial arts. Aktivitas training seperti ini terang memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dan untuk keperluan ini kiranya perlu didirikan suatu "Yayasan Pendidikan" yang fungsi pokoknya adalah mengusahakan agar dapat diperoleh dana yang diperlukan untuk pembiayaan tersebut secara teratur dari perusahaan-perusahaan besar asing yang beroperasi di negeri kita. Dengan perkataan "secara teratur" dimaksudkan bukan "once for all grants", tetapi grants



yang secara periodik dan kontinu diberikan kepada Yayasan dari keuntungan tahunan yang diperoleh dari operasi bisnis perusahaan asing itu; bila perlu grants yang diambil dari keuntungan itu, dibebaskan dari pajak perusahaan. Dengan begini, melalui kehadiran Yayasan dengan misi seperti tersebut di atas, "spread effects" kehadiran bisnis asing di negeri kita menjadi lebih luas, dalam artian manfaat kehadirannya di sini tidak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang langsung bekerja dalam lingkungannya ataupun oleh kas negara melalui pajak dan royalties yang distornya, melainkan dapat dinikmati pula oleh anggota masyarakat kita pada umumnya. Lagi pula melalui training seperti ini azas keadilan yang dituju oleh pembangunan kita dapat lebih terjamin. Keadilan di sini tercapai bukan melalui pembagian pendapatan yang lebih merata, tetapi melalui penggunaan lebih banyak oleh pembangunan sumber energi yang praktis dipunyai oleh setiap warga negara, yaitu tenaga-kerja manusia. Akhirnya, dengan meningkatkan mutu teknis tenaga-kerja dari "unskilled" menjadi sesedikitnya "rather skilled", kita tidak hanya membantu menaikkan kapasitas mencari nafkah individu, tetapi melipatgandakan modal manusia negeri kita.

Bila direnungkan lebih mendalam, sebenarnya training besar-besaran di bidang teknologi juga mempunyai arti ekonomi yang besar. Adalah satu kenyataan bahwa salah satu kekurangan yang fundamental bagi usaha pembangunan Indonesia adalah kurangnya tenaga teknisi menengah yang harus melaksanakan apa-apa yang sudah diputuskan di atas. Teknisi menengah ini, di negeri manapun, pada azasnya tidak dihasilkan dalam lingkungan pendidikan formil. Sekolah-sekolah paling jauh hanya dapat melatih ke arah penguasaan peralatan analisa, baik yang bersifat matematis maupun filosofis. Teknisi menengah ditempa dan diproduksi di pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis dan di negeri-negeri yang sudah maju pusat-pusat kegiatan tersebut tidak kurang jumlahnya, baik yang berupa pabrik, galangan kapal, maskapai bangunan, asuransi, perbankan, biro administrasi, dan lain-lain. Di negeri yang belum maju seperti Indonesia, justru tempat-tempat penggemblengan tenaga teknisi menengah yang seperti itu sangat kurang jumlahnya, sedangkan perkembangan pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis tersebut pada gilirannya sangat tergantung pada ada tidaknya tersedia tenaga teknisi menengah tadi. Alhasil terjadilah satu lingkaran yang tak berujung-pangkal. Maka untuk dapat ke luar dari lingkaran yang mencekik ekonomi ini perlu ditingkatkan aktivitas training ketrampilan teknis dan industrial



arts dan guna membiayai aktivitas yang terang menelan banyak biaya itulah dipikirkan pendirian suatu Yayasan Pendidikan. Dengan begini kita berarti memasukkan teknologi itu sendiri ke dalam masyarakat dan bukannya hanya puas dengan mengimpor hasil-hasil teknologi yang berkembang dan dikembangkan di negeri lain.

Sebenarnya masih dapat dipikirkan persiapan-persiapan nasional lainnya di bidang perundang-undangan, perburuhan, dan lain-lain, tetapi berhubung terbatasnya ruangan harian kita ini tidak dapat dibahas walaupun secara pokok-pokoknya saja.

### Kesimpulan

Dengan memasukkan modal dan bisnis asing di negeri kita berarti kita secara sadar hendak berpartisipasi di dalam ekonomi dunia dan melalui partisipasi ini hendak mempercepat pembangunan ekonomi dalam rangka pengisian arti kemerdekaan bangsa. Namun hendaknya perlu disadari bahwa begitu kita memutuskan modal dan bisnis asing boleh masuk, kita sebenarnya mulai dari saat itu sudah merubah dimensi dan sifat ekonomi kita, terlepas dari soal apakah modal tersebut hanya pelengkap atau tidak, juga terlepas dari soal apakah ia boleh diinvestir hanya di sektor tertentu dan sama sekali dilarang ditanam di bidang tertentu lainnya.

Untuk dapat menghadapi perubahan dimensi dan sifat tersebut dengan baik, kiranya perlu diadakan perubahan struktur di dalam tubuh ekonomi bangsa. Perubahan struktur ini menjadi lebih penting bila diingat bahwa secara tradisional ekonomi kita sudah merupakan ekonomi ekspor dan suatu ekonomi terbuka. Jawabannya lalu bukanlah menyendiri ataupun memisah diri dari ekonomi dunia dengan preteks menjaga "kemerdekaan ekonomi" tetapi bagaimana membangun struktur yang sepadan guna dapat menarik hasil yang sepadan dari saling ketergantungan ekonomi di dalam proses pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat dan semakin kompleks.